

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Aset Pemprov dikuasai swasta

Butuh Payung Hukum

JAKARTA - Pengelolaan aset hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, masih banyak yang dikuasai oleh pihak swasta. Demikian diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada INDOPOS, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Kamis (21/11/2019) ■

Untuk mengambil alih aset-aset tersebut, ia pun mendorong rekannya di DPRD untuk membuat payung hukum. Ia menjelaskan, data terakhir di Komisi C DPRD DKI Jakarta bidang keuangan, inventarisasi aset milik DKI baru mencapai Rp6,2 triliun dari jumlah aset keseluruhan Rp475 triliun di 2019.

"Aset tentunya sudah dibenahi, tapi ternyata ada beberapa persoalan, milik DKI masih dikuasai orang lain, karena rangkaiannya terlalu panjang. Jadi kita harus merevisi atau membuat payung hukum agar lebih kuat," ungkap dia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dani Anwar. Menurut dia, Pemprov DKI wajib mengejar pengusaha atau pengembang yang memiliki tanggungan atau utang berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Fasos dan fasum menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan Pemprov DKI. "Pengelolaan aset di Jakarta Utara misalnya, ini perlu regulasi yang lebih baik agar penyerahan aset dari pihak ke tiga soal Fasos, Fasum itu bisa dilaksanakan secepatnya" terang Dani di lokasi yang sama.

Persoalan itu juga diakui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono. Ia membeberkan, sebanyak 98 bidang tanah seluas 211 hektar atau 2.110.617 meter persegi aset milik Pemrov DKI Jakarta bermasalah di pengadilan. Aset-aset itu tersebar di sejumlah daerah.

Menurut Pujiono, salah satu masalah yang dihadapi di pengadilan, yakni adanya sertifikat ganda. "Ada puluhan aset kami yang bermasalah, berperkara di hukum," kata dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Dari 98 bidang tanah yang bermasalah, sambung Pujiono, ada aset yang dimenangkan Pem-

prov DKI, Pemprov DKI kalah, dan masih berproses di pengadilan. Pertama, Pemprov DKI menang atas 39 bidang tanah seluas 143,1 hektar. Kedua, Pemprov DKI kalah atas 14 bidang tanah seluas 20,8 hektar. Ketiga, masih proses hukum atas 45 bidang tanah seluas 47 hektar.

Pujiono menuturkan, Pemprov DKI akan melepas aset yang diperkarakan jika kalah dalam perkara tersebut. "Pasti (dilepas jika kalah, Red), tapi kan masih ada upaya (hukum, Red). Kalau memang kalah, ya sudah, kalau sudah inkrah, mau apa lagi," kata dia.

Selain aset yang bermasalah, tambah Pujiono, masih ada sejumlah aset Pemprov DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat maupun yang sedang diproses sertifikatnya. Pemprov DKI didampingi Badan Peme-

riksa Keuangan (BPK) RI memproses sertifikasi aset-aset DKI.

Salah satu aset yang sedang diproses, yakni lahan seluas 65 hektar di Cengkareng, Kabupaten Tangerang. Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI sebelum memproses sertifikat aset tersebut, yakni mengukur ulang dan mematok batas lahan.

"Kami mohon ke BPN (Badan Pertanahan Nasional-red) untuk diukur ulang, dikembalikan batas patoknya. Kami amankan dulu karena di situ sudah ada bercokol beberapa hunian warga yang kami anggap tidak punya hak," ucap Pujiono.

Sementara itu, aset yang sudah tercatat dan memiliki alas hak sebanyak 47.301 bidang. "Aset yang sudah dicatat, sudah audited, dan hasil inventarisasi itu kurang lebih Rp 470-an triliun," tukas dia. (aen)

Inventarisasi Aset DKI 2019

- Baru capai Rp6,2 T
- Total aset Rp475 T

Kondisi Aset Milik Pemprov DKI

- Pemerintah menang atas 39 bidang tanah seluas 143,1 hektar
- Pemerintah kalah atas 14 bidang tanah seluas 20,8 hektar
- Masih proses hukum atas 45 bidang tanah seluas 47 hektar